

KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN UMKM

Slamet Subandi*

Abstrak

Unability of cooperative to be the solution of the mainstay institution of SMEs empowerment was not because of the wrong basic concept of cooperative institution but it was because of development approach which is directly influenced by political policy and economy of the world. Globalization is one of the factor which should encourage cooperative development (it is a challenge so that SMEs group to be united in the frame of enhancing the scale of business and efficiency), nevertheless its tendency becomes a constraint to the sustainability of cooperative development. Solution which is needed to empower cooperative is a strong and real commitment by revitalizing cooperative activities and enforcement of financing.

Alternative in purifying cooperative institution could be done by way of : 1). Improving and completing cooperative law (accelerate the ratification of cooperative bill); 2). Giving extension, training and education to cooperative board of directors, managers and method so as they could really know and understand about cooperative completely and genuinely; 3). Appropriate, directed, planned and sustainable socialization/promotion through media; 4). Preparing appropriate standard and method of cooperative subject to support cooperative cadres forming on the basic, medium and high education; e). Giving most of promotion and responsibility on cooperative development to cooperative movement itself.

I. Pendahuluan

Sesuai dengan devinisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya sangat diperlukan, karena rakyat merupakan salah satu komponen berdirinya suatu Negara. Bagi Indonesia, rakyat bukan hanya sebagai indikator keberadaan negara, tetapi juga merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling tinggi dalam konstitusi. (UUD 1945). Keinginan untuk mensejahterakan semua rakyat juga merupakan amanat konstitusi dan oleh karena sebagian besar (87,4%) rakyat Indonesia adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan pemberdayaan UMKM.

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan

*) Kasubid Perencanaan dan Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan untuk memberdayakan UMKM, atau hanya merupakan salah satu solusi. Timbulnya pertanyaan tersebut dari satu sisi terlihat wajar-wajar saja karena banyak kegiatan-kegiatan yang jika dilakukan oleh koperasi tidak berhasil (keberhasilannya lebih kecil dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak-pihak lain). Pertanyaan terlihat janggal, memperhatikan bahwa keberadaan dan kiprah koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UUD 1945.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau menghambat kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis), karena pada awalnya mereka memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan bisnis koperasi dapat dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian juga faktor lingkungan (eksternal) yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan pemerintah, serta lingkungan usaha ekonomi yang dibangun oleh banyak pelaku usaha lainnya, tidak dapat diharapkan berperan untuk mendukung keberhasilan koperasi.

Masalah kedua yang dihadapi koperasi adalah dalam membangun partisipasi anggota koperasinya. Dalam hal ini banyak pakar antara lain Nasution 1991 yang mengatakan “Berikan kebutuhan yang paling diperlukan oleh anggota”. Azas one man one vote yang menjadi slogan koperasi belum menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi. Demikian juga asas yang merupakan prinsip dasar koperasi ini, belum dapat dipahami oleh sebagian besar anggota koperasi dengan tingkat kesejahteraan, dan pendidikan masih rendah, serta lingkungan sosial budaya masih kurang kondusif (adanya hubungan patron klient, ewuh pakewuh, ndoro kawulo dan lain-lain).

Memang banyak konsep pembangunan partisipasi anggota koperasi yang bersumber dari koperasi-Koperasi di luar negeri, tetapi konsep tersebut tidak dapat diaplikasikan karena kondisi faktor-faktor lingkungan ekonomi sosial dan budaya tidak sama. Kekeliruan yang mungkin perlu diluruskan dalam membangun partisipasi anggota koperasi adalah adanya anggapan bahwa penyebab rendahnya partisipasi anggota koperasi lebih dikarenakan besarnya intervensi pemerintah serta adanya kelemahan kebijaksanaan dasar dalam pembangunan koperasi yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 1992 dan heterogenitas anggota koperasi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan tidak konsistennya penilaian terhadap keberhasilan pembangunan koperasi adalah “Belum adanya standar baku tentang indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator yang dibangunnya sendiri. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sesuai dengan

azas dan prinsip dasar koperasi tujuan pembangunan koperasi adalah untuk mendukung pembangunan kemampuan ekonomi dari anggotanya. Keberhasilan koperasi akan dicirikan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi anggotanya, sebagai akibat dari adanya hubungan dalam kegiatan ekonomi antara anggota dengan koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi seharusnya dapat berhubungan langsung dengan produsen. Hubungan langsung ini dapat mengurangi biaya-biaya diluar biaya produksi seperti biaya pembungkus, dan biaya pemasaran sehingga harga dasar yang diperoleh koperasi dapat lebih murah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan koperasi tersebut di atas, mungkin dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam kontek pembangunan ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, alat pemerintah untuk membangun kesejahteraan semua warga masyarakat. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok-kelompok miskin. Koperasi juga merupakan organisasi non profit yang dapat mengumpulkan serta mempersatukan kelompok-kelompok marginal, yang karena kemarjinalannya tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Satu hal lagi yang merupakan kekuatan koperasi selama ini jarang diperhitungkan adalah "Koperasi merupakan bentuk kelembagaan formal yang memiliki jaringan sangat luas bersifat internasional. Kelemahan dari koperasi adalah karena faktor internalnya sendiri yang membatasi partisipasi anggota, karena koperasi menghendaki homogenitas anggota terutama dari aspek kepentingannya terhadap koperasi (Syarif dan Nasution 1989). Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi

Selanjutnya kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; **Faktor perekat**. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Signifikansi faktor ini tergambar jelas diperhatikan adanya fenomena bahwa seorang anggota yang telah berhasil dalam usahanya cenderung akan meninggalkan koperasi walaupun sebelumnya keberhasilan orang tersebut didukung sepenuhnya oleh koperasi. Orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi. Peningkatan kemampuan menyebabkan orang berubah kepentingannya maka orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi

kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota merupakan kata kunci dalam membangun koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan cerminan dari kepentingan anggota. Tetapi sekarang AD diseragamkan (oleh instansi pemerintah), yang berarti menyeragamkan kepentingan anggota. Hal ini dimaksudkan agar AD yang disusun sesuai dengan peraturan. Tetapi perlu diingat bahwa perlakuan tersebut merupakan kesalahan, oleh sebab itu harus diperbaiki. Disini pihak yang berwenang boleh saja menjadi konsultan dalam penyusunan AD, tetapi sebagai konsultan yang harus mampu melihat kepentingan anggota dari suatu koperasi yang akan dibentuk.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai pembina untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem. Kenyataan juga koperasi sering dipilih tetapi kerap kali menjadi pilihan yang tidak tepat. Pada akhirnya koperasi selalu diidentikan sebagai badan usaha yang marginal. Perkembangan koperasi mengalami pasang surut sesuai dengan intensitas pembinaan yang dipengaruhi oleh banyak aspek. Pada akhirnya timbul pertanyaan mengapa sampai sekarang peran dan kiprah koperasi di Indonesia sulit dikembangkan.

II. Kedudukan dan Kiprah koperasi dalam era Tahun 2000-an

1. Kedudukan koperasi dalam System perekonomian Nasional

Walaupun koperasi telah berdiri di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, tetapi kinerja koperasi sebagai institusi solusi pemberdayaan ekonomi rakyat (yang pada waktu itu disebut Bumi Putera) belum pernah mencapai harapan. Kinerja koperasi terus mengalami pasang surut sampai pada suatu saat (dekade tahun 1990-an) mengalami titik terendah (stagnan), bahkan kemudian menurun (periode reformasi), sehingga sekarang ini koperasi oleh sebagian besar masyarakat hanya dianggap sebagai solusi kelembagaan pembangunan UKM yang banyak bermasalah.

Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi solusi kelembagaan andalan pemberdayaan UKM bukan karena konsepsi dasar kelembagaan koperasi yang salah, tetapi lebih banyak disebabkan oleh komitmen politik dan pendekatan pembangunan, yang secara langsung dipengaruhi oleh politik dan perekonomian dunia. Kondisi globalisasi merupakan salah satu faktor yang seharusnya mendorong pengembangan koperasi (tantangan agar kelompok UKM bersatu dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi), bahkan sekarang sebaliknya menjadi kendala yang menghambat kelangsungan pengembangan koperasi. Hal ini terkait nampaknya terkait juga dengan pola pembangunan koperasi yang mengedepankan aspek usaha dan indikator keberhasilan kuantitatif, yang tidak mendukung kebersamaan dalam koperasi.

2. Asas dan Prinsip koperasi

Pembangunan atau pemberdayaan koperasi idealnya harus dimulai dengan memperhatikan asas dan prinsip-prinsip koperasi. Asas gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh koperasi sudah secara tegas dinyatakan dalam amanat konstitusi. Sedangkan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagian besar sudah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia sekarang ini (yang diwarnai dengan ketimpangan dan banyaknya jumlah orang miskin dan pengangguran).

1). *Pengertian koperasi*

- (1). Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan bahwa koperasi *adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi.*
- (2). Menurut Internasional Cooperative Alliance (ICA) *Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis,*
- (3). Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 (Pasal 1 ayat 1) koperasi adalah *Badan usaha yang beranggotaan orang-orang yang berkumpul secara sukarela (pasal 5 ayat 1 a.) untuk mencapai kesejahteraan (pasal 3) memodali bersama (pasal 4.1) dikontrol secara demokratis (pasal 5 ayat b) orang-orang itu disebut pemilik danpangguna jasa koperasi yang bersangkutan (pasal 17 ayat 1)*
- (4). Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono (2000), salah seorang pakar koperasi yang pemikiran-pemikirannya perlu dipahami mendefinisikan koperasi sebagai: *koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.*

2). *Nilai- Nilai koperasi*

Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh badan usaha ekonomi lainnya, Dalam hal ini Ibnu Soedjono berpendapat bahwa, *koperasi-Koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persaingan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.*

Prinsip menolong diri sendiri (self-help) percaya pada diri sendiri (self-reliance) dan kebersamaan (cooperation) Dalam lembaga koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, apabila para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai.

3). *Prinsip-prinsip koperasi*

ICA (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah :

Pertama : Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial, politik dan agama.

Kedua : *koperasi* adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan

Ketiga : Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka

Keempat : Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya

Kelima : Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi

Keenam : Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional

Ketujuh : Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggotanya.

4). Keanggotaan koperasi

Berdasarkan pengertian koperasi yang dikemukakan oleh ICA di atas maka : *"Anggota koperasi adalah orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis"*.

Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, dipihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik berkewajiban memberikan kontribusi pada organisasinya. Dipihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Dengan kedua fungsi tersebut, anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan, dan hak, serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan anggota dapat diuraikan menjadi :

- (1). Pemilik, pemakai, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan).
- (2). Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunal.
- (3). Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi koperasinya
- (4). Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya;
 - a. memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya,
 - b. memiliki keyakinan bahwa hanya dengan bergabung bersama-sama maka kepentingan ekonomi dan sosialnya secara bersama-sama akan dapat diselesaikan.
 - c. memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.
- (5). Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran rasional dari orang-orang yang ; a) merasa cocok bila mereka melakukan kegiatan tolong-menolong khususnya dalam bidang ekonomi, b) merasa kuat bila mereka bersatu menjadi anggota Koperasi, dan c) merasa tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya.

5). Organisasi dan koperasi

Organisasi sering diartikan sebagai interaksi dan kerja sama antara dua orang/pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, di dalam sebuah perusahaan, kerja sama ini mutlak diperlukan karena kegiatan dalam perusahaan sangat kompleks, beraneka ragam, dan saling terkait antara yang satu dan yang lain. Kerja sama ini tidak terbatas antar karyawan di dalam perusahaan tetapi juga dengan berbagai pihak di luar perusahaan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Organisasi koperasi dibentuk atas dasar kepentingan dan kesepakatan anggota pendirinya dan mempunyai tujuan utama untuk lebih mensejahterakan anggotanya. Sistem kontribusi insentif sangat relevan dalam suatu organisasi koperasi. Sistem tersebut dapat menjamin eksistensi koperasi dan sekaligus merangsang anggota untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Dalam pembicaraan mengenai organisasi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, kiranya lebih dulu perlu dipahami bahwa basis terendah dalam kehidupan pedesaan adalah "desa", atau kampung dusun-dusun kecil yang penduduknya hidup berkelompok dengan keterikatan/ketergantungan antar individu yang sangat erat. Komunitas penduduk berlangsung dalam rangka membangun kehidupan yang pada awalnya bersifat subsistem. Meskipun demikian (pola hidup subsistem), kaitan pemasaran sudah ada dengan daerah urban yang lebih modern. Dalam hal ini yang dikenal sebagai pedesaan adalah kumpulan rumah tangga petani yang secara tradisional mengambil keputusan-keputusan produksi, konsumsi, dan investasi. Di sektor perkotaan kegiatan yang sama dilakukan oleh lembaga perusahaan dan rumah tangga secara terpisah dengan tujuan memaksimalkan penghasilan perusahaan. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

- (1). Kelompok koperasi (Cooperative Groups); Bahwa koperasi adalah kelompok orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelompok dengan harapan akan memperbesar skala ekonomi mereka yang berdampak akhir pada meningkatnya efisiensi dari kegiatan (jual-beli) yang dilakukannya bersama-sama.
- (2). Menolong diri sendiri (Self Help Organization); Bahwa dengan berkelompok mereka akan menjadi lebih besar dan lebih kuat posisinya dalam pasar, sehingga mereka dapat menolong diri sendiri.
- (3). Perusahaan koperasi (Cooperative Enterprises) dan; Bahwa koperasi merupakan perusahaan yang jika dalam kegiatan usahanya mendapatkan nilai lebih maka kelebihan yang diterima dapat dikembalikan lagi kepada anggotanya dan atau dapat dijadikan tambahan modal usaha serta investasi.

- (4). Meningkatkan keuntungan ekonomi anggotanya (member promotion): Tujuan berkoperasi adalah kebersamaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan memperbesar skala ekonomi (economic of scale) , mengurangi resiko usaha (down sizing) dan kontribusi insentif (incentive contribution).

Dari prinsip dan tujuan koperasi tersebut, selama ini baru sangat sedikit yang dapat diakomendir oleh gerakan koperasi, bahkan sebaliknya ada unsur-unsur yang sama sekali belum dapat dilaksanakan seperti menolong diri sendiri dan efisiensi biaya. Kondisi yang demikian sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi anggota koperasi yang rata-rata terbelakang miskin (dibawah pendapatan rata-rata nasional) dan arah pembinaan pemerintah yang lebih pada pembangunan usaha ketimbangan pengkaderan koperasi.

Buruknya kinerja koperasi ternyata diperparah oleh kurang baiknya kinerja pembina. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah diketahui sejak era orde baru, yang diduga terkait erat dengan pendekatan, strategi dan pola pembinaan serta kualitas SDM pembina. Dalam hal ini Nasution 1990 dalam desertasinya mengatakan bahwa kunjungan pembina membawa dampak negatif bagi kinerja koperasi (KUD), yang diindikasikan dari semakin banyak kunjungan pembina ke suatu KUD maka akan semakin cepat KUD tersebut mengalami penurunan kinerjanya. Perbaikan konsepsi pembinaan ternyata sampai sekarang ini belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan hal ini diduga terkait dengan komitmen politik untuk memberdayakan koperasi yang cukup kuat, sehingga pembenahan permasalahan tersebut belum mendapat respon yang significant dari Pemerintah.

Permasalahan diatas nampaknya juga terkait dengan masalah-masalah internal koperasi yang belum terselesaikan antara lain; a) proses penyempurnaan RUU Perkoperasian yang sudah tersendat hampir 4 tahun; b) Pergantian Pengurus Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang berakhir kisruh sehingga gerakan koperasi pecah menjadi beberapa kelompok; c) koperasi tidak diberikan peran dalam agenda Dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 (dalam pidato Kenegaraan Presiden SBY tanggal 16 Agustus 2006 tidak menyebutkan koperasi); d) dalam dunia pendidikan mata ajaran perkoperasian menjadi pelajaran pilihan dan sampai sekarang belum ada standar baku untuk mata ajaran tersebut dan; e) Promosi, penyuluhan dan sosialisasi koperasi di media masa selama era reformasi hampir tidak pernah ada lagi.

Disamping masalah makro di atas, dalam gerakan koperasi juga terdapat masalah mikro yang sangat mempengaruhi kinerja koperasi, yang sampai sekarang ini juga belum terselesaikan antara lain; a) Anggota koperasi cenderung hanya sebagai pemilik tetapi bukan sebagai pengguna yang diindikasikan dari rendahnya keterkaitan usaha antara

anggota dan koperasi yang secara langsung mempengaruhi rendahnya manfaat koperasi buat anggota; b) Kepentingan bisnis koperasi lebih diutamakan (menyolok) daripada kepentingan anggotanya; c) Partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna sangat rendah; d) rasa kebersamaan diantara anggota maupun antara anggota dengan koperasi juga hampir tidak ada; e) Kaderisasi sangat jarang dilakukan dan jika adapun sifatnya temporary atau tidak berkesinambungan serta; f) Proses Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan tidak berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta hasil-hasil penelitian ataupun pemikiran-pemikiran ilmiah tidak pernah dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijaksanaan.

III. Solusi Pemberdayaan Koperasi

Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan; a) memperbaiki dan melengkapi aturan perundang-undangan (mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU per koperasian); b) Melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan Pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat, agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh (Koperasi yang genuine); c) Melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang tepat terarah dan terencana serta berkesinambungan; d) Menyusun standar dan metoda yang tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi koperasi ditingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta; e) Menyerahkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan koperasi kepada gerakan koperasi sendiri.

Alternatif revitalisasi usaha dan penguatan pembiayaan koperasi dapat dilakukan melalui; a) mengkaji secara cermat bidang usaha yang mempunyai keunggulan komparatif yang tepat untuk diusahakan oleh koperasi dan sesuai dengan usaha anggotanya sebagai fokus pengembangan usaha koperasi; b) Kegiatan koperasi hanya dilakukan atas dasar perencanaan dan kelayakan bisnis bukan hanya karena adanya suatu program yang diciptakan oleh pemerintah (sektoral di tingkat pusat); c) Membangun jaringan antara koperasi serta dengan lembaga usaha lainnya baik dalam keperluan pengadaan bahan baku dan teknologi maupun pemasaran hasil produksi; d) Merancang sekaligus melaksanakan model pendidikan dan latihan teknis usaha yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha anggota koperasi serta; e) Membangun sistem pembiayaan koperasi dengan prioritas pengembangan lembaga interlending dan penjaminan kredit yang handal dan bertanggung jawab.

Dalam membahas peluang koperasi untuk menjadi lembaga alternatif pemberdayaan UKMK juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan anggotanya yang UKM. Dalam hal ini salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah “faktor perekat dalam koperasi (antara koperasi dengan anggotanya dan antar anggota di dalam koperasi) adalah, kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi. Lebih lanjut juga perlu difikirkan bagaimana jika keberhasilan koperasi telah mampu meningkatkan perekonomian seseorang, sehingga orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi. Dalam hal ini perlu disadari bahwa peningkatan kemampuan ekonomi seseorang dapat menyebabkan orang berubah kepentingannya. Sehingga mungkin saja orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota merupakan kata kunci dalam membangun faktor perekat dalam koperasi.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai Pembina untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah system, merupakan salah satu penyebab dari kesulitan membangun sistem koordinasi antar pembinaan. Menurut Mutis (1999), untuk memberdayakan wirausaha dengan skala usaha kecil, menengah, dan koperasi ataupun kalangan usaha di sektor informal adalah salah satu bentuk menterjemahkan visi kerakyatan dalam fraxis bisnis kekinian. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perKoperasian. koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada atas asas kekeluargaan.

Karena adanya berbagai penafsiran tentang koperasi sebagai akibat dari bentuk badan usaha ini yang mudah dimasuki oleh unsur-unsur non-ekonomi maka dalam membicarakan koperasi ada baiknya jika lebih dulu disepakati berbagai aspek penting dalam koperasi sebagai berikut: Dalam usaha, petani untuk menaikkan pendapatan keluarga dan faktor konsumsi keluarganya (melalui peningkatan produksi usaha taninya), inilah mereka banyak mengadakan kontak dengan dunia luar, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi. Penggunaan faktor produksi sedikit banyak ditentukan oleh ketentuan adat istiadat melalui lembaga tradisional seperti sistem Mapalus di Sulawesi dan sekarang melalui kelompok tani. Dengan berorganisasi ini, koordinasi pemanfaatan sumberdaya yang langka bisa dinikmati oleh petani-petani individu. Dengan demikian apa yang tampak dalam kehidupan ekonomi para petani adalah hubungan kekerabatan itu sangat erat dan berpengaruh besar, sebab mereka hidup di lokasi yang sama serta mendorong para petani bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan.

Berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang ada di pedesaan umumnya dimiliki ciri yang pluratistik. Dengan pengertian luas, yang dikatakan oleh Gunardi (1981) sebagai kolektivisme desa mau kolektivisme asli. Ciri utama kolektivesme tersebut adalah semangat gotong-royong, tolong-menolong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi yang tinggi dalam pola paguyuban yang kuat.

Berbagai bentuk organisasi sosial dan ekonomi yang ada dan berkembang di pedesaan seperti Subak, Mapalus, Lumbung Pitih Nagari pada dasarnya merupakan wujud dari Koperasi Sosial. Bila lembaga semacam ini dibina maka akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun koperasi *Modern* yang mandiri, berdaya guna, dan berhasil guna bagi pembangunan ekonomi masyarakat desa dan pedesaan. Bila dibandingkan antara Koperasi Sosial yang telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu di pedesaan dalam berbagai bentuk organisasi sosial ekonomi yang diuraikan di atas terlihat hanya sedikit perbedaan yang tidak mendasar, seperti diperlihatkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Antara Koperasi Sosial (Tradisional) dan Koperasi Modern

No	Koperasi Sosial (Tradisional)	Koperasi modern
1	Perlakuan terhadap semua anggota sama (satu orang satu suara)	Perlakuan terhadap semua anggota adil berdasarkan partisipasinya dalam kegiatan koperasi
2	Satu orang satu suara	Suara berdasarkan besarnya partisipasi dalam kegiatan koperasi
3	Jumlah koperasi banyak dan berskala Kecil	Dapat beramalgalamasi membentuk koperasi-Koperasi yang lebih besar
4	Pelayanan bersifat pasif	Pelayanan agresif
5	Ada kesepakatan untuk tidak bertindak tanpa persetujuan bersama dengan wewenang pengambilan keputusan dari rapat anggota	Keputusan berdasarkan mayoritas dan kebijaksanaan didelegasikan penuh kepada pengurus
6	Kebijaksanaan bersifat desentralisasi	Kebijaksanaan bersifat terpusat
7	Diorganisir berdasarkan batas wilayah keanggotaan	Diorganisir sesuai kebutuhan pemasaran suatu konfigurasi sistem yang saling terkait
8	Kebijaksanaan personalia dalam seleksi dan penerimaan tidak berdasarkan yang terbaik	Kebijaksanaan personalia dalam seleksi dan penerimaan berdasarkan yang terbaik
9	Mutu dan cara kerja karyawan terikat pada status qou dan masa lalu	Mutu dan cara kerja karyawan terikat pada perubahan yang terjadi
10	Tindakan pengurus dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan tekanan politik tidak memperhatikan akibat jangka panjang	Tindakan pengurus berdasarkan kepentingan jangka panjang yang terbaik tanpa memperhatikan pemilihan kembali pengurus atau keuntungan jangka panjang

1	2	3
11	Pengelolaan dan kepengurusan berdasarkan keputusan sehari-hari didelegasikan pada karyawan	Manejer dan pengurus lebih mencurahkan perhatian pada masalah-masalah strategis dan perencanaan.
12	Masalah manajemen personal cukup besar	Perhatian terhadap masalah pemahaman pasar dan resiko bunga kurang mendapat perhatian
13	Proritas pada pelayanan, sedangkan keuntungan merupakan tujuan sekunder	Keuntungan menjadi prioritas utama dengan pelayanan sebaik mungkin selama dapat di peroleh keuntungan yang memadai
14	Sebagian anggota yang aktif dalam kegiatan koperasi memperoleh dampak yang tidak proporsional dalam keputusan usaha	Keputusan usaha dibuat berdasarkan kapada apa yang diyakini dapat menjaga kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang
15	Tekanan manajemen terbatas pada issue dan masalah internal organisasi	Perhatian menejemen kepada faktor persaingan luar (eksternal), seimbang dengan masalah-masalah internalnya

Sumber : Nasution Muslimin 1996

IV. PENUTUP

Sehubungan dengan permasalahan di atas, berapa issue yang layak untuk didiskusikan; a) aksesibilitas dan UKM terhadap sumber-sumber permodalan, terutama untuk menghilangkan kesan bahwa masalah permodalan UKMK dapat diselesaikan melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro saja; b) Aspek perlindungan terhadap koperasi yang selama ini tertutupi oleh semangat globalisasi yang sebenarnya bertentangan dengan UU Nomor 25 tahun 1992; c) Masalah kelembagaan koperasi yang antara lain diindikasikan dari anggapan sekarang ini bahwa koperasi tidak berbeda dengan jenis badan usaha ekonomi lainnya dan; d) Evaluasi terhadap berbagai program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara koperasi dan UKM.

Sebagai bagian dari kehidupan bangsa pembangunan koperasi tidak terlepas dari pengaruh perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, hankam ataupun aspek-aspek lainnya. Realita memperlihatkan bahwa perkembangan koperasi semakin redup, antara lain disebabkan perubahan kebijaksanaan pemerintah sebagai tuntutan dari era globalisasi. Kebijakan moneter semakin memperlemah koperasi/UKM untuk mengakses sumber permodalan. Bank bukan lagi menjadi agen development Pemilikan BUMN oleh perusahaan asing bukan lagi hal yang aneh. Subsidi kredit untuk UKM dan koperasi semakin dikurangi.

Jika koperasi hanya dijadikan sebagai sebuah alternatif kelembagaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM, sedangkan diketahui bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok miskin, maka perlu dipikirkan adanya opsi lain. Namun demikian dalam pemilihan opsi seharusnya koperasi dinyatakan sebagai suatu sistem kelembagaan yang dengan kriteria-kriteria tertentu dapat menjadi soko guru perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UKM. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam Sistem Perekonomian Nasional tersebut, sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi. Pertanyaan akhir yang perlu dijawab adalah “Bentuk koperasi yang bagaimana yang seharusnya dibangun di Indonesia ?” Apakah Koperasi Single Purpose atau Koperasi Multy Purpose ? Kedua jenis koperasi ini nampaknya cocok, untuk UKM, tetapi harus disesuaikan dengan bidang usaha, kondisi ekonomi dan sosial dari anggota yang UKM dengan beragam jenis kegiatan usaha terutama yang bersifat spesifik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus, (2006). *Kumpulan hasil-hasil Workshop Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UMKM* (laporan sementara belum diterbitkan).
- Surya Dharma Ali, (2007). *Komitmen Pemberdayaan UMKM dan Koperasi*. Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.
- Nasution Muslimin, (2001). *Koperasi, Konsepsi Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa Depan Bangsa*.
- , (1996). *Membangun Koperasi Sebagai Wahana Efektif Untuk Memberdayakan Perekonomian Rakyat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Ibnu Soedjono. Et.al, (1996). *koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi*. FORMASI, Jakarta